



BAB V

PERBANDINGAN IDEOLOGI

A. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Edios* yang berarti cita-cita dan *Logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu dan paham. Dalam pengertian sempit atau sederhana, ideologi diartikan sebagai gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Sedangkan ideologi dalam arti luas digunakan untuk segala cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif.

Ideologi menurut W. White adalah:

“soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan”.

Sedangkan Harold H. Titus mendefinisikan ideologi adalah:

“Suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masukan politik dan ekonomi filsafat social yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat”.

Ada banyak sifat atau tipe ideology. Secara umum tipe ideology ini bagi menjadi empat (BP-7, 1991:384), yaitu:

1) Ideologi Konservatif

Yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang ada (status quo), setidak-tidaknya secara umum, walaupun membuka peluang. Kemungkinan perbaikan dalam hal teknis.

2) Kontra Ideologi

Yaitu melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan dianggap baik. Tipe ideology ini selalu bersikap berseberangan dengan ideology yang mapan.

3) Ideologi Reformis

merupakan tipe ideologi yang berkehendak merubah keadaan. Ideologi ini menginginkan perubahan yang perlahan dan bertahap.

4) Ideologi Revolusioner

Yaitu ideology yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat itu atau secara dramatis.

Sifat ideologi kadang kala berubah dalam perjalanan yang panjang. Misalnya ideology Komunis pada saat penguasanya belum berkuasa, biasanya bersifat revolusioner, kemudian jadi berubah menjadi konservatif pada saat sudah memegang kekuasaan. Perjalanan Pancasila sebagai ideology juga pernah mengandung sifat reformis dan revolusioner.

B. Makna Ideologi Bagi Negara

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, yaitu pembukaan, batang tubuh serta penjelasan UUD 1945.

Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat Negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Supomo adalah dalam kerangka Negara integralistik, untuk memberdakan paham-paham yang digunakan oleh pemikir-pemikir kenegaraan lain.

Pancasila bersifat integralistik karena:

- 1) Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan
- 2) Adanya semangat kerja sama (gotong royong)
- 3) Memelihara persatuan dan kesatuan, dan
- 4) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

C. Ideologi-Ideologi Negara

Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti Kapitalisme dan Komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran filosofis, yang kemudian dituangkan dalam rumusan ideologi dan setelahnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang telah dilalui keseluruhan proses ini sampai puluhan tahun. Manifesto komunis, misalnya diumumkan pada 1841 sebagai pernyataan ideologis dari falsafah Marxisme. Konsep politiknya diwujudkan pada 1917, dalam revolusi Oktober Rusia. Ada jarak waktu selama 76 tahun antara ideologi dan politik.

Proses yang dilalui Pancasila sedikit khusus, praktis sebelum ada pemikiran filosofis sebelum tahun 1945 yang secara sistematis menguraikan pemikirannya secara mendalam mengenai ideologi untuk Negara yang hendak dibentuk, pemikiran mengapa kita merdeka, tetapi belum ada wawasan terpadu mengenai bagaimana konsepsi masa depan yang hendak dibangun itu. Pemikiran demikian baru timbul setelah pada pemimpin kita bermusyawarah secara intensif di penghujung Perang Dunia ke II, secara eksplisit oleh ketua BPUPKI Dr. Radjiman. Dengan demikian penerimaan Pancasila pertama-tama dirumuskan sebagai consensus politik, yang didasarkan kepada nilai kultur masyarakat.

1. Ideologi Sosialisme

Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx (1818-1883), tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional, masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.

Ciri-ciri Negara komunis, adalah:

- Bersifat masyarakat anti pasar (menolak penetapan harga melalui mekanisme pasar)
- Adanya maksimalisasi peran Negara
- Pembatasan partisipasi politik
- Media sepenuhnya ada pada/dibawah kontrol kekuasaan
- Digunakannya sistem Partai tunggal dominan (*one party system*)

2. Ideologi Liberalisme

Ajaran liberalism bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak

asasi itu kemudian memiliki nilai-nilai dasar (intrinsic), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup ditengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas.

Ancaman liberalism sangat terselubung dan secara tidak sadar dapat tertanam dalam cara berfikir dan bertindak masyarakat tertentu di Indonesia. Paham liberalism selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.

Prinsip-prinsip yang dianut Negara liberal, antara lain:

- Prinsip kebebasan individual (*individual freedom*)
- Prinsip kontrak sosial (*social contract*)
- Prinsip masyarakat pasar bebas (*free market*)
- Mengakui eksistensi pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat.

Prinsip-prinsip inilah yang menempatkan ideologi liberalisme tidak saja berbeda tapi merupakan antitesisnya demokrasi komunis.

3. Fasisme

Pada puncak kekuasaannya, Fasisme tampaknya menjadi ideologi yang mampu menaklukkan seluruh dunia. Namun tidak ada consensus akademis mengenai hakikat regim-regim fasis utama di Eropa dan istilah "fasis" seringkali menjadi tidak lebih daripada suatu masa masa perlakuan kejam.

Namun, meskipun dengan segala ketidakepatannya, nyaris semua penjelasan tentang fasisme dapat dibagi kedalam dua kelompok. Yang pertama, melihat fasisme terutama sekali sebagai gerakan reaksioner, produk lanjutan dari perjuangan kelas. Ini mempertegas bahwa fasisme merupakan suatu upaya oleh kelompok *grande bourgeoisie* untuk menaklukkan tantangan revolusioner kepada posisinya. Fasisme merupakan kediktatoran teroris yang tak tersembunyikan dari anasir chauvinistic dan imperialistic modal uang yang paling reaksioner.

Penjelasan kedua memandang fasisme sebagai gerakan revolusioner. Gerakan revolusioner ini berhasil mendapatkan dukungan dari semua lapisan komunitas, meskipun pendukung utamanya berasal dari kelas menengah dan menengah kebawah.

Gagasan-gagasan utama fasisme, yaitu:

- Gagasan mengenai mitos ras unggul (*the myth of race*). Konsep superioritas ras merupakan keunggulan atas sentral.
- Anti semitisme

- Totalitarianism, artinya fasisme tidak sebagai/sekedar suatu sistem organisasi politik atau pemerintahan melainkan juga keseluruhan kehendak (*will*), pemikiran (*thought*) dan perasaan (*feeling*) suatu bangsa.
- Gagasan tentang elite dan pemimpin.

D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1. Arti Ideologi Terbuka

Ciri has ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka menurut pandangan Negara modern bahwa Negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasar.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat yang menyatakan, "...terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya".

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Factor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi pancasila, adalah sebagai berikut:

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara tepat.
- b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau
- d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang manis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai

dasar yang tidak berubah, nilai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dan tercermin dalam pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar Negara yang fundamental. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

E. Sifat-Sifat Ideologi

Kebenaran pola pikir seperti terurai diatas adalah sesuai dengan sifat ideologi yang memiliki tiga dimensi penting (BP-7 Pusat, 1993) sebagai berikut:

1. Dimensi Realitas

Nilai yang terkandung di dalam , dirinya, bersumber dari nilai-nilai ril kehidupan yang berasal dari masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.

2. Dimensi Idealisme

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya biasanya terjalin berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealism yang terkandung didalamnya.

3. Dimensi Flexibilitas

Melalui pemikiran tentang dirinya, ideologi itu memperbesar dirinya, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Dari dapat kita simpulkan bahwa suatu ideologi terbuka, karena bersifat demokratis, memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut sebagai dinamika internal yang mengandung dan merangsang mereka yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu kita yakin bahwa relevansi

ideologi kita akan makin kuat, jati dirinya akan makin mantap dan berkembang. Sejalan dengan itu kita yakini bahwa Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa (Alfian, 1991:195).

F. Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis
- b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme
- c. Mencegah berkembangnya paham liberal
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat
- e. Penciptaan norma yang baru melalui suatu konsensus